



Judul : Kecam Aneksasi Israel  
Tanggal : Rabu, 01 Juli 2020  
Surat Kabar : Indo Pos  
Halaman : 2

# Kecam Aneksasi Israel

JAKARTA-Komis I DPR RI terus mengamati rencana aneksasi Israel terhadap tepi barat Palestina. Wakil Ketua Komisi I DPR RI Abdul Haris Almasyhari menyatakan, rencana aneksasi Israel terhadap tepi barat Palestina adalah cita-cita Israel untuk memusnahkan Palestina.

"Sikap Komisi I DPR RI menentang upaya aneksasi Israel terhadap tepi barat Palestina dan menolak upaya merupakan legislasi penjajahan Israel atas Palestina," ujar Abdul Haris di Jakarta, Selasa (30/6).

Komis I DPR RI juga mengancam keras aneksasi yang dilakukan Israel dibawah pemerintahan Benjamin Netanyahu terhadap tepi barat Palestina. Karena tindakan Israel tersebut bertentangan dengan hukum dan kesepakatan Internasional terutama resolusi Dewan Keamanan perihal konflik Israel-Palestina.

"Sebagai representasi rakyat Indonesia, Komisi I DPR RI memberikan dukungan secara konsisten terhadap bangsa Palestina dan mendesak PBB, Organisasi, dan Komunitas Internasional untuk mengintervensi situasi krisis di Palestina dengan mengutamakan tindakan kemanusiaan," katanya.

Ia menyerukan kepada seluruh anggota Parlemen dan Pemerintah di seluruh dunia untuk memperjuangkan resolusi damai untuk Palestina merdeka. Dan masyarakat Internasional untuk mempertahankan prinsip-prinsip multilateralisme yang berdasarkan pada tatanan dunia berbasis aturan guna terciptanya stabilitas keamanan dunia.

"Aneksasi Israel terhadap Tepi Barat Palestina merupakan ancaman serius terhadap pola hubungan internasional dan dianggap dapat memberi celah bagi negara lain untuk melakukan aneksasi dengan klaim teritorial yang mengabaikan hukum prinsip internasional," terangnya.

Hal yang sama diungkapkan Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR) Hidayat Nur Wahid. Dia mengancam

langkah Israel yang mengembangkan hukum internasional dan resolusi-resolusi PBB dengan menganeksasi wilayah di Tepi Barat Palestina sebelum 1 Juli 2020.

Ia berharap agar Presiden Joko Widodo (Jokowi) menggagalkan kembali usaha maksimal untuk menolak dan menggagalkan rencana tersebut dengan menggalang gerakan boikot produk Israel sebagai yang diutarakannya saat Konferensi Luarbiasa Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) di Jakarta, pada 2016 lalu.

"Pemerintah Indonesia dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sudah sepakat dan kecamannya. Harus ada langkah yang lebih konkret salah satunya dengan menggagalkan gerakan boikot atas produk-produk Israel dan kembali mengupayakan perbaikan di Palestina," ujarnya.

HNW sapaan akrabnya juga mengapresiasi langkah politisi dan pemimpin dunia yang aktif menolak aneksasi itu. Lebih dari 1000 anggota keputusan dari 25 negara Eropa menyetujui petisi surat kecaman dan menyetujui rencana aneksasi Israel terhadap tanah-tanah Palestina di Tepi Barat.

"Mereka menuntut agar pemimpin negara di Eropa juga menolak. Kami dukung aksi seperti itu, karena sama seperti yang diperjuangkan oleh DPR RI dan pemerintah Indonesia," ungkapnya.

Mengutip salah satu negara Eropa, yaitu Irlandia yang tengah membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) Larangan Mengimpor Barang, Jasa, dan Sumber Daya Alam yang berasal dari Wilayah Pendudukan Ilegal Israel, yang diinisiasi oleh senator Frances Black,

HNW sangat mendukung langkah tersebut. "RUU semacam ini perlu juga diadopsi oleh Indonesia, sebagai bukti persetujuan penjajahan yang disetujui dari Pembukaan UUD 1945," tegasnya.

HNW menuturkan, RUU semacam ini perlu dihadirkan, karena harus tidak memiliki hubungan diplomatik satu sama lain. Pasalnya hubungan ekspor-impor ilegal antara Indonesia-Israel diam-diam masih berlangsung.

Lebih jauh Wakil Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini mengatakan, gerakan yang telah dipopulerkan oleh para aktivis hak asasi manusia di seluruh dunia, termasuk Amerika Serikat dan Eropa, dengan gerakan Boikot Divestasi Sanksi (BDS). Boikot yang dikampanyekan bukan hanya dari segi ekonomi saja, tetapi boikot dari

segi budaya juga akademik.

"Gerakan BDS ini semakin masif dilakukan para terpelajar dan aktivis HAM di negara barat. Ini akan menjadi prioritas besar. Dan Indonesia sudah selayaknya untuk jadi contoh dan memimpin gerakan ini di antara negara-negara lain," ujarnya.

Ia meminta Menteri Luar Negeri Republik Indonesia untuk lebih memaksimalkan usahanya dan menggagalkan target Israel untuk menganeksasi tanah-tanah Palestina di Tepi Barat, dengan bekerja sama dengan organisasi internasional atau negara lain.

"Menlu perlu memaksimalkan koordinasi dan kerjasama dengan ASEAN, OKI dan Perserikatan Bangsa-Bangsa baik melalui Dewan Keamanan maupun Sidang Umum," ungkapnya. (nas)

DPR - RI